



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Jendral Sudirman No. 532 Sago Telp. (0756) 7464131 Fax. (0756)-7464085
Email: bapedalitbang@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/ 22 /Kpts/BAPEDALITBANG-PS/2023

T E N T A N G

PETA PROSES BISNIS
BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan yang merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, perlu disusun Peta Proses Bisnis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Peta Proses Bisnis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Infonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 104 Tahun 2021

tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 178 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Peta Proses Bisnis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Identifikasi Proses, Sub Proses dan Kegiatan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan ini.
- KETIGA : Manfaat Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. dapat melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu kegiatan/pekerjaan sehingga solusi penyempurnaan proses pelaksanaan lebih terarah; dan
 - b. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 31 Mei 2023

KEPALA BADAN,



HADI SUSILO, SSTP, M.Si

NIR. SP. 19770522 199703 1 001

3.2. Identifikasi Peta Proses Bisnis

Tabel 1. Identifikasi Peta Proses Bisnis

No.	Proses	Jenis Proses	Kode
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Utama	BAPEDALITBANG.PESSEL.01
2	Meningkatnya Kapasitas Birokrasi	Utama	BAPEDALITBANG.PESSEL.02
3	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan dan Layanan Hukum	Pendukung	BAPEDALITBANG.PESSEL.03
4	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi	Pendukung	BAPEDALITBANG.PESSEL.04
5	Pelayanan dan Informasi Publikasi	Pendukung	BAPEDALITBANG.PESSEL.05
6	Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana	Lainnya	BAPEDALITBANG.PESSEL.06
7	Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan	Lainnya	BAPEDALITBANG.PESSEL.07
8	Pengelolaan Administrasi dan Umum	Lainnya	BAPEDALITBANG.PESSEL.08
9	Manajemen Resiko	Lainnya	BAPEDALITBANG.PESSEL.09

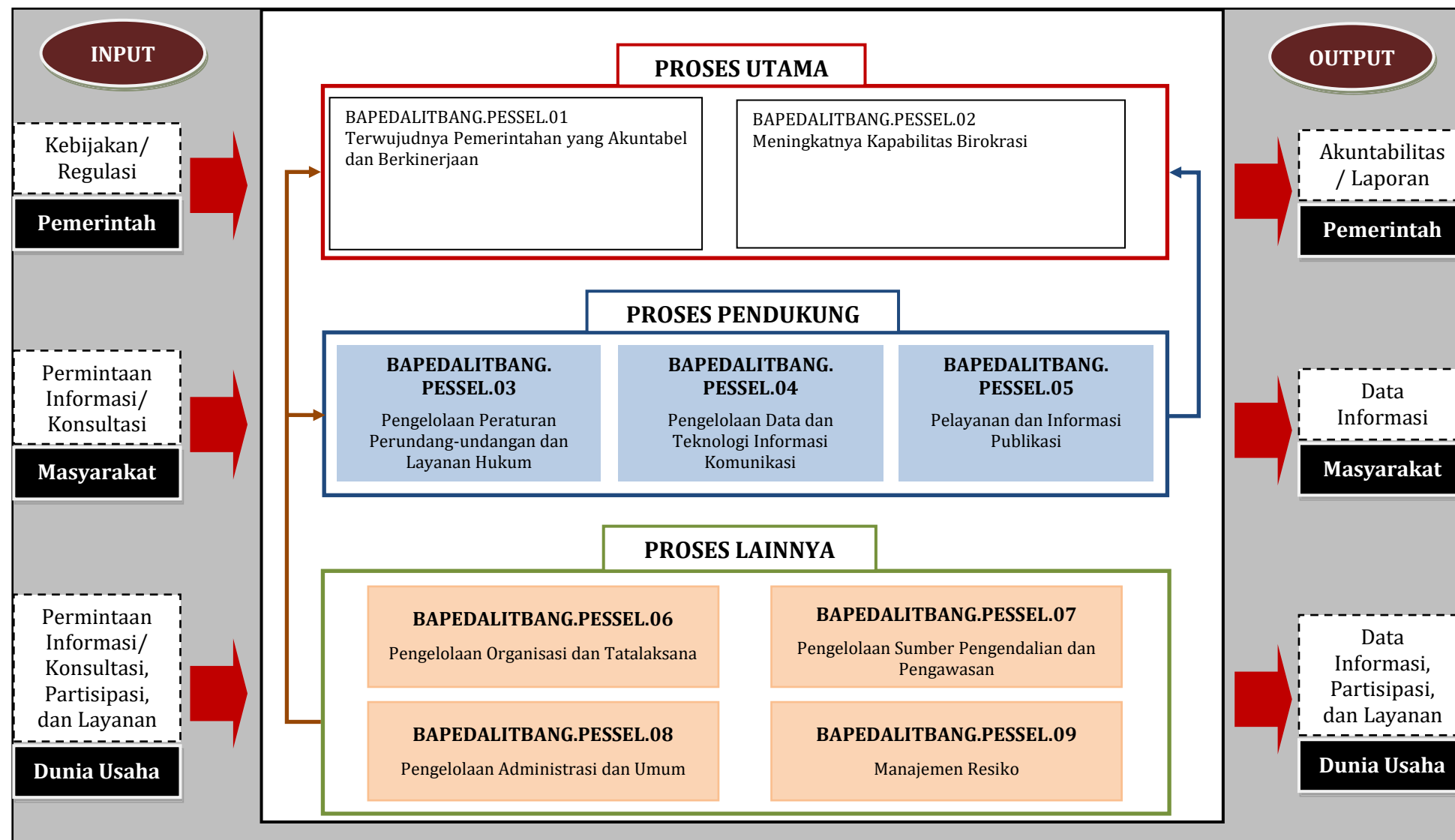


Tabel 2. Identifikasi Peta Sub-Proses Bisnis

No.	Sub-Proses	Kode
(1)	(2)	(4)
1	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPEDALITBANG.PESSEL.02.01
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPEDALITBANG.PESSEL.02.02
3	Penelitian dan Pengembangan Daerah	BAPEDALITBANG.PESSEL.03.01

Program
pada
RENSTRA
(Turunan
dari
Sasaran)

3.3. Peta Proses Bisnis



3.4. Peta Sub-Proses Bisnis

